



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Sumatera Utara	19.360.721.000
2	Provinsi Riau	18.062.198.000
3	Provinsi Kepulauan Riau	20.261.653.000
4	Provinsi Lampung	2.000.000.000
5	Provinsi DKI Jakarta	2.000.000.000
6	Provinsi Jawa Tengah	21.826.131.000
7	Provinsi DI Yogyakarta	23.968.142.000
8	Provinsi Jawa Timur	27.301.155.000
9	Provinsi Sulawesi Selatan	2.000.000.000
10	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.000.000.000
11	Kota Banda Aceh	33.478.767.000
12	Kab. Nagan Raya	2.000.000.000
13	Kab. Tapanuli Utara	26.930.091.000
14	Kota Medan	36.792.797.000
15	Kota Sibolga	2.000.000.000
16	Kab. Siak	2.000.000.000
17	Kab. Ogan Komering Ilir	2.000.000.000
18	Kota Palembang	32.563.403.000
19	Kota Lubuk Linggau	2.000.000.000
20	Kab. Banyuasin	2.000.000.000
21	Kab. Bangka	28.353.598.000
22	Kab. Bangka Tengah	2.000.000.000
23	Kab. Kaur	2.000.000.000
24	Kab. Mukomuko	2.000.000.000
25	Kab. Lampung Barat	28.186.303.000
26	Kab. Lampung Selatan	2.000.000.000
27	Kota Bandar Lampung	27.930.145.000
28	Kota Metro	2.000.000.000
29	Kab. Tulang Bawang Barat	2.000.000.000
30	Kota Depok	2.000.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
31	Kab. Serang	31.885.637.000
32	Kab. Tangerang	28.921.904.000
33	Kota Cilegon	28.424.490.000
34	Kota Tangerang	34.422.901.000
35	Kota Serang	28.744.488.000
36	Kota Tangerang Selatan	34.213.477.000
37	Kab. Banyumas	2.000.000.000
38	Kab. Boyolali	2.000.000.000
39	Kab. Cilacap	24.693.637.000
40	Kab. Jepara	2.000.000.000
41	Kab. Kebumen	2.000.000.000
42	Kota Surakarta	32.955.109.000
43	Kota Tegal	2.000.000.000
44	Kab. Sleman	32.095.325.000
45	Kota Yogyakarta	30.422.296.000
46	Kab. Bangkalan	2.000.000.000
47	Kab. Bondowoso	31.364.539.000
48	Kab. Gresik	27.010.988.000
49	Kab. Lamongan	28.712.194.000
50	Kab. Pacitan	2.000.000.000
51	Kab. Probolinggo	25.767.431.000
52	Kab. Tuban	2.000.000.000
53	Kab. Tulungagung	28.763.620.000
54	Kota Madiun	30.239.200.000
55	Kota Malang	35.795.120.000
56	Kota Mojokerto	2.000.000.000
57	Kota Pontianak	33.572.708.000
58	Kab. Kotawaringin Timur	25.480.253.000
59	Kab. Berau	29.051.497.000
60	Kab. Pasir	25.689.638.000

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
61	Kota Tarakan	27.354.761.000
62	Kota Bitung	33.602.094.000
63	Kab. Gorontalo	26.605.808.000
64	Kab. Bone Bolango	25.963.896.000
65	Kab. Donggala	28.058.041.000
66	Kota Palu	28.460.512.000
67	Kab. Gowa	2.000.000.000
68	Kab. Maros	28.643.116.000
69	Kota Makassar	24.963.585.000
70	Kab. Buton	26.068.522.000
71	Kab. Konawe	30.957.317.000
72	Kota Bau-bau	25.253.076.000
73	Kab. Badung	28.958.182.000
74	Kab. Gianyar	25.669.534.000
	Total Provinsi	138.780.000.000
	Total Kab/ Kota	1.249.020.000.000
	Total Nasional	1.387.800.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN TUGAS KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 /PMK.07/2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota*) menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan pertanggungjawaban penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(cap dan tanda tangan)
(materai Rp6000,-)

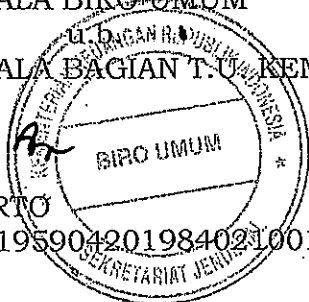
Nama

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 /PMK.07/2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JENIS BELANJA	RUPIAH	TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
dst...					
Total					

Keterangan :

- Kolom 1 : diisikan dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisikan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013.
Kolom 3 : diisikan kegiatan yang direncanakan.
Kolom 4 : diisikan dengan belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan keuangan, atau belanja hibah.
Kolom 5 : diisikan jumlah rupiah dari masing-masing belanja.
Kolom 6 : diisikan target dan indikator capaian program yang terkait dengan kegiatan, misal : persentase Angka Partisipasi Kasar; persentase ruang kelas yang memenuhi standar, dst.

Gubernur/Bupati/Walikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(cap dan tanda tangan)

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO